



Kemendikdasmen

**Laporan Kinerja Triwulan II
BPMP Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2026**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan selama Triwulan II tahun 2026.

A. Progress Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan II		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen						
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	81.78	0	0	Rp5.085.393.000	Rp3.340.504.439
DI.7605.QDB.750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7960	1800	1810	Rp5.085.393.000	Rp3.340.504.439
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	100	0	0	Rp461.857.000	Rp312.021.939
DI.7605.QDB.751 Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	Lembaga	14	4	4	Rp461.857.000	Rp312.021.939
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Selatan						
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	-	-	Rp13.416.329.000	Rp9.139.779.051

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan II		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
WA.7606.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	Rp13.416.329.000	Rp9.139.779.051
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Selatan minimal A	Predikat	AA	-	-	Rp174.334.000	Rp74.009.980
WA.7606.EBA.956 Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	Rp7.500.000	Rp0
WA.7606.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0	0	Rp166.834.000	Rp74.009.980

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Perencanaan Berbasis data Satuan Pendidikan dalam meningkatkan Kualitas Pembelajaran jenjang Sekolah Dasar; 2. pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Pendampingan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. pelaksanaan Bimtek Pemanfaatan PID untuk Satuan Pendidikan/ Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran;
4. Pelaksanaan pendampingan secara rutin melalui kanal komunitas pengelola Dana BOSP Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Pendampingan penyaluran dana BOSP Tahap 1 Tahun 2026 melaui dashboard pemantauan Dana BOSP pada satuan pendidikan;
6. Pelaksanaan pendampingan secara rutin melalui kanal komunitas pengelola Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Modul Edukasi Gizi dan Kantin Sehat di Satuan Pendidikan (perjenjang);
8. Penguatan pelaksaasn G7KAIH di kependuan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler angkatan II;
9. Sosialisasi dan Penguatan kapasitas warga sekolah dalam pelaksaasn budaya sekolah aman dan nyaman Angkatan I (Paud & SD);
10. Sosialisasi dan Penguatan kapasitas warga sekolah dalam pelaksaasn budaya sekolah aman dan nyaman Angkatan II (SMP & SMA);
11. Monitoring dan evaluasi implementasi G7KAIH di Satuan Pendidikan;
12. Pelaksanaan lomba O2SN jenjang SD & SMP tingkat provinsi.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Progress/Kegiatan

1. Berdasarkan hasil pengumpulan data (Juni 2026) satuan pendidikan pelaksana implementasi PM dan atau KKA dari 1306 satuan pendidikan (PAUD,SD, SMP, SMA/SMK, SLB dan Kesetaraan) di 13 Kab/Kota se Kalimantan Selatan: 64,6% satuan pendidikan sudah mengimplementasikan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM); 5,4% satuan pendidikan sudah mengimplementasikan Mapel Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA); 30% satuan pendidikan sudah mengimplementasikan pendekatan (PM) dan (KKA) ;

2. Pelaksanaan Verval Digitalisasi Pembelajaran jenjang SMA 100%, SMP 100%, SD 99,8%, PAUD 90,71%, Kesetaraan 75% satuan pendidikan sudah mengisi verval digitalisasi;

3. Pada bulan Juni 2026 disusun laporan hasil pemetaan mutu per kategori satuan pendidikan tingkat wilayah tahun 2026, mencakup seluruh 7 kategori sasaran (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan) dengan total 8.844 satuan pendidikan non-keagamaan se-Kalimantan Selatan, dengan rincian: PAUD 4.225 satdik (47,77%), SD 2.939 satdik (33,23%), SMP 677 satdik (7,65%), SMA 217 satdik (2,45%), SMK 128 satdik (1,45%), SLB 82 satdik (0,93%), dan Kesetaraan 576 satdik (6,51%). Dokumen Laporan Hasil Pemetaan Mutu Per Kategori Tingkat Wilayah Semester I Tahun 2026 telah tersusun dan menjadi dasar penetapan Sekolah Model SPMI;

4. sampai dengan bulan Juni, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan koordinasi rutin dengan Pengelola Dana BOSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, juga dilakukan pembuatan dashboard Pemantauan Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2026 yang diupdate secara berkala untuk menjadi dasar tindak lanjut percepatan penyaluran dan perencanaan Dana BOSP Tahun 2026. Selanjutnya di akhir bulan Juni, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer Daerah Non Fisik Tahun 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk: melakukan koordinasi pelaksanaan penyaluran Dana BOSP, Pemantauan pelaksanaan penyaluran Dana BOSP dan Pemantauan percepatan penyaluran dan perencanaan Dana BOSP

Sementara untuk pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Dana Transfer Daerah Non Fisik Tahun 2026, bertujuan untuk: Melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan, Melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal pengelolaan Dana BOSP Reguler, Kinerja, dan Afiriasi, Melakukan penyusunan Gugus Belajar dan RAB BOSP Kinerja sebagai persiapan pelaksanaan penggunaan Dana BOSP Kinerja untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan

Dari pelaksanaan koordinasi, rakor dan penyampaian data progress tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

- Sebanyak 8.011 (99,99%) satuan pendidikan semua jenjang telah salur Dana BOSP Tahap 1 Tahun 2026 dari total 8.018 satuan pendidikan
- Sebanyak 7.879 (98%) satuan pendidikan semua jenjang telah disahkan RKAS Dana BOSP Tahun Anggaran 2026
- Sebanyak 5.603 (69,9%) satuan pendidikan semua jenjang siap salur Dana BOSP Tahap 2 Tahun 2026 dari total 8.018 satuan pendidikan

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

Kendala/Permasalahan

1. Tantangan utama dalam mengimplementasikan Pembelajaran Mendalam (PM) maupun KKA adalah membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh guru. Setiap guru memiliki latar belakang, pengalaman, dan kesiapan yang berbeda sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan, terutama dalam mendukung pembelajaran yang lebih inovatif dan kolaboratif;
2. kendala verval jenjang SD, sekolah tidak bisa menyesuaikan titik sekolah, sehingga hanya sampai draft. Dashboar verval Kesetaraan belum ada, sehingga belum bisa dipantau secara optimal;
3. Belum semua satuan pendidikan sasaran menyelesaikan seluruh tahapan implementasi SPMI pada semester pertama;
4. Terdapat 17 satuan pendidikan tidak dapat disalurkan Dana BOSP nya, beberapa penyebab kendala tersebut antara lain dikarenakan terdapat satuan pendidikan jenjang PAUD yang menyatakan menolak dana BOSP serta terdapat satuan pendidikan yang terlambat melakukan pelaporan Dana Tahun 2025 hingga batas waktu pelaporan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan kolaborasi antar guru, kegiatan komunitas belajar, supervisi akademik, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. koordinasi dengan Dinas Pendidikan lebih intensif untuk mendampingi satuan yang belum verval;
3. Penyusunan rencana percepatan pendampingan pada semester kedua dengan pembagian klaster satuan pendidikan berdasarkan tingkat ketercapaian;
4. Dilakukan koordinasi lebih lanjut baik oleh tim satgas BOSP Kemendikdasmen dan pendampingan secara lebih intens dengan tim satgas BOSP daerah untuk mendorong pelaporan Dana BOSP

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Rapat Koordinasi dengan pemda, perguruan tinggi program revitalisasi Tahun 2026;
2. Melaksanakan Rakor Progres Perencanaan Dokumen SPMB ke-2 yang dilaksanakan dengan moda Daring;
3. Melaksanakan Rakor Progres Perencanaan Dokumen SPMB ke-3 yang dilaksanakan dengan moda Daring;
4. Melaksanakan pendampingan SPMB di Kab/Kota;
5. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan SPMB di 13 Kab/kota dan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pada Pelaksanaan TKA jenjang SMP/MTs./Sederajat di 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan jenjang SD/MI/Sederajat;
7. Memantau pelaksanaan TKA Susulan Jenjang SD/MI/Sederajat dan TKS Susulan SMP/MTs./Sederajat lewat dashbor;
8. Pemantauan pelaksanaan TKA secara keseluruhan melalui dashbor TKA;
9. Melaksanakan Rapaat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah;

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

10. Pemantauan melalui Portal PIJAR Bunda PAUD tahun 2026 dalam rangka wajib belajar 13 tahun (1 tahun Prasekolah);
11. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) bersama Dinas Pendidikan 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Penguatan kapasitas Tim PMP BPMP Kalimantan Selatan dalam implementasi instrumen dan mekanisme penjaminan mutu pendidikan Tahun 2026;
13. Koordinasi dengan ditjenPaudasmen dan terkait kebijakan dan regulasi terbaru program PMP Tahun 2026;
14. Penyusunan rencana teknis pelaksanaan pendampingan penjaminan mutu satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK) di 13 Kab/Kota.

Progress/Kegiatan

1. sampai dengan bulan Juni BPMP Kalsel telah menyelesaikan pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan daya tampung yang digunakan dalam SPMB dari Dinas Pendidikan dalam bentuk kegiatan : Pelaksanaan Rakor Progres Dokumen Perencanaan SPMB ke-4 yang diselenggarakan oleh BPMP Kalsel untuk melaporkan capaian kemajuan pembuatan dokumen perencanaan SPMB oleh Kab/Kota/Prov, Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan perhitungan daya tampung dan rombongan untuk Kabupaten Tanah Bumbu jenjang SD berdasarkan undangan Disdik sehingga 100% perhitungan dan verifikasi serta serah daya tampung dan rombongan selesai, pelaksanaan sosialisasi Juknis yang telah ditandatangani walikota dan simulasi serta ujicoba aplikasi online SPMB untuk Kota Banjarbaru jenjang SD, pelaksanaan sosialisasi Juknis yang telah ditandatangani walikota dan simulasi jenjang SD untuk Kota Banjarbaru. selain penyelesaian pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan daya tampung, BPMP Kalsel juga melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dengan hasil 100% atau sama dengan 13 kab/kota provinsi telah menyelesaikan semua dokumen perencanaan SPMB telah diselesaikan yang terdiri dari 15 juknis, 15 SK daya tampung, 15 SK Penetapan wilayah dan 15 SK PANitia bersama yang dittd oleh pimpinan daerah serta Ada 9 kabupaten/kota atau sama dengan 80 % dan 1 Provinsi atau 100% telah melaksanakan penandatanganan Fakta integritas;
2. Berdasarkan Dashboard Pemantauan Perkembangan Revitalisasi PDM 2026 dari Kemendikdasmen, di Kalimantan Selatan sampai dengan bulan Juni 2026 ada sebanyak 158 sekolah penerima program revitalisasi, dengan rincian : Jenjang PAUD 103 sekolah, jenjang SD 40 sekolah, jenjang SMP 9 sekolah, dan Jenjang SMA 6 sekolah. Dari jumlah 158 sekolah tersebut ada sekolah yang sudah proses pencairan dana tahap I dan ada sekolah yang baru PKS;
3. Sampai dengan bulan Juni 2026 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi penanganan Anak Tidak sekolah. Kegiatan Rapat Koordinasi penanganan dan Pencegahan Anak Putus Sekolah, dilaksanakan dengan tujuan: Mensosialisasikan oleh kemendikdasmen Peraturan Presiden no 3 tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Meningkatkan pemahaman semua stakeholders pada Pencegahan dan penanganan ATS, Menyelaraskan program wajib belajar 13 tahun bersama PKBM se kalimantan Selatan serta Menyusun Rencana Tindak Lanjut dan Kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan dan Penanganan ATS. berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini diperoleh hasil pada bulan Juni sudah terpantau data hasil verifikasi data anak tidak sekolah di kabupaten kota. pada sebaran ATS di bulan april, drop out sebesar 18.724(28,23%); Belum Pernah Bersekolah 23.470 (35,38%); Lulus Tidak Melanjutkan 24.141 (36,39%);
4. Pada bulan Juni 2026 disusun laporan hasil pendampingan perencanaan dan penganggaran daerah semester I tahun 2026 serta dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen Tingkat

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Provinsi (18 Juni 2026), yang mencakup seluruh 14 daerah sasaran (1 Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota atau 100%). Sampai dengan akhir semester I 2026, seluruh 14 daerah telah melalui tahap koordinasi, sinkronisasi anggaran, dan pendampingan awal perencanaan SPM Pendidikan, sebagai dasar evaluasi menuju target akhir tahun 2026: 45% daerah (setara 6 dari 14 daerah) meningkat capaian SPM Pendidikan dan 42% daerah (setara 6 dari 14 daerah) mencapai status Tuntas Pratama/Tuntas Madya. Penetapan status Tuntas per daerah secara definitif akan dievaluasi pada semester II berdasarkan hasil pendampingan implementasi SPM Pendidikan lanjutan.

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait Keterbatasan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait sehingga Sosialisasi Fakta Integritas sering kali hanya menysar panitia inti sehingga kepala sekolah, operator, komite sekolah, dan masyarakat belum memahami fungsi serta konsekuensinya;
2. Koordinasi lintas instansi belum optimal. Pelaksanaan pengawasan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti inspektorat, dinas pendidikan, dan unit pengaduan masyarakat, namun koordinasinya belum selalu berjalan efektif;
3. Masih banyak Sekolah sasaran revitalisasi dengan berkas belum lengkap (Dokumen Formulir PUPR dan Foto dokumentasi/ruang);
4. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan di beberapa kabupaten/kota (dari 13 kab/kota sasaran) masih memerlukan intervensi lebih intensif untuk dapat mencapai target 42% (6 dari 14 daerah) Tuntas SPM pada akhir tahun.

Strategi/Tindak Lanjut

1. BPMP Kalsel selalu menghimbau dan meminta agar disdik maupun satdik bisa Menyusun strategi komunikasi publik melalui rapat koordinasi, media sosial, website resmi pemerintah daerah, surat edaran, dan publikasi di satuan pendidikan. BPMP Kalsel juga rajin memberikan contoh komunikasi publik dari media sosial dari provinsi lain/satdik lain di luar Kalsel yang dishare pada WAG SPMB Kalsel;
2. Menghimbau Disdik agar Menyelenggarakan rapat koordinasi berkala sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan SPMB sebagaimana yang telah dilakukan oleh BPMP Kalsel secara rutin untuk memastikan penyelesaian masalah secara cepat dan terpadu;
3. Koordinasi lebih lanjut oleh Tim Revitalisasi BPMP ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota untuk menindaklanjuti satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi untuk segera melengkapi berkas dokumen Formulir PUPR dan foto/dokumentasi/ruang, dan sekolah mengunggah dokumen yang sudah lengkap melalui aplikasi revitalisasi satuan pendidikan;
4. Penyusunan rencana pendampingan asimetris pada semester II dengan prioritas daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar, guna mengejar target 45% daerah meningkat capaian SPM dan 42% daerah Tuntas SPM Pendidikan.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori sangat baik

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. pelaksanaan analisis program dan anggaran serta pelaksanaan Revisi anggaran;
2. penyusunan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) untuk periode Triwulan II;
3. penginputan Realisasi kinerja capaian output periode Januari s.d Mei tahun 2026 pada Aplikasi Sakti

Progress/Kegiatan

1. pelaksanaan analisis program dan anggaran serta pelaksanaan Revisi anggaran;
2. penyusunan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) untuk periode Triwulan II;
3. penginputan realisasi kinerja capaian output tahun 2026 sampai dengan bulan Mei pada Aplikasi Sakti.

Kendala/Permasalahan

untuk capaian output sakti pada bulan Juni tidak bisa bernilai sempurna 100% karena adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada RO Dukungan Manajemen komponen layanan umum

Strategi/Tindak Lanjut

berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di bulan Juli agar nilai capaian output bisa optimal

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Selatan minimal A

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan Rencana Aksi tahun 2026;
2. Pengukuran Kinerja Triwulan I tahun 2026;
3. melaksanakan pengisian capaian RO pada Spasikita sampai dengan bulan Maret 2026

Progress/Kegiatan

1. penyelesaian dokumen Penyusunan Rencana Aksi tahun 2026;
2. penyelesaian dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan I tahun 2026;
3. melaksanakan pengisian capaian RO pada Spasikita sampai dengan bulan Mei 2026

Kendala/Permasalahan

adanya penyesuaian proses penyusunan analisis capaian kinerja dan program anggaran karena adanya perubahan SK Tim dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

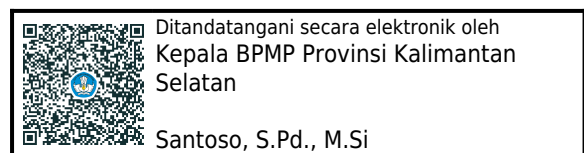
Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan pimpinan, seluruh ketua tim kerja dan penanggungjawab program prioritas dalam penyusunan analisis capaian kinerja dan program anggaran sesuai dengan SK baru yang akan diimplementasikan pada triwulan berikutnya

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Agar pemantauan capaian kinerja setiap program terus dilakukan secara berkala, tetapkan jadwal sehingga bisa diketahui progres setiap bulan, tidak hanya per triwulan. Laporan tersebut menjadi alat ukur terhadap sejauh mana capaian kinerja pada setiap program prioritas (protas) dan bisa dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan program. Surat Keputusan (SK) Struktur Organisasi yang memuat tentang Tim Kerja, dan pembagian tugas lainnya diperkirakan segera selesai dan akan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja Triwulan III dan Triwulan IV;
2. Penyusunan rencana kerja Triwulan III dilakukan secara kolaboratif agar setiap kegiatan dapat saling mendukung. Kegiatan dengan anggaran yang relatif kecil dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain tanpa mengurangi substansi maupun tujuan yang ingin dicapai;
3. Pemanfaatan anggaran dilaksanakan dengan menerapkan prinsip high impact, low cost, sehingga menghasilkan dampak yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien;
4. Upaya pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) perlu menjadi perhatian bersama. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tanggung jawab seluruh Tim Kerja PAUD-SMA bersama wali wilayah. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap capaian SPM di setiap daerah, serta pendampingan kepada daerah yang belum mencapai target. Pendampingan dapat memanfaatkan perjalanan dinas rutin di luar anggaran program khusus agar tetap efektif dan efisien;
5. Praktik-praktik baik (best practice) yang telah berhasil diterapkan perlu benar-benar diwujudkan, didokumentasikan, dan disebarluaskan. Apabila diperlukan, dapat diselenggarakan lomba khusus terkait BSAN sebagai sarana apresiasi dan berbagi praktik baik. Berbagai aspek, seperti penguatan pilar spiritual, model penjaminan mutu di daerah, dan inovasi lainnya, dapat dijadikan sebagai contoh praktik baik. Sementara itu, target yang belum tercapai tidak boleh ditinggalkan, tetapi harus menjadi fokus dan target kinerja pada Triwulan berikutnya. Selain itu, para penanggung jawab program prioritas diharapkan terbuka dalam menyampaikan kebutuhan yang mendukung pencapaian kinerjanya sehingga dapat diintegrasikan atau didukung melalui kegiatan program lainnya.

Banjarbaru, 9 Juli 2026



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR